

# FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN TANZANIA TERHADAP KERJASAMA ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA) DENGAN UNI EROPA

Zuriel Juliando Wasia<sup>1)</sup>, Putu Ratih Kumala Dewi<sup>2)</sup>, A.A. Agung Ayu Intan Parameswari<sup>3)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana  
Email: [j.wasia73@gmail.com](mailto:j.wasia73@gmail.com)<sup>1)</sup>, [tih\\_ratihkumaladw@yahoo.com](mailto:tih_ratihkumaladw@yahoo.com)<sup>2)</sup>,  
[prameswari.intan@gmail.com](mailto:prameswari.intan@gmail.com)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The EPA Cooperation between EAC and European Union has been conducted for over than 10 years. The cooperation reached its full agreement in 2014 and is planned to be signed in 2016. EPA is a free trade cooperation to remove obstacles such as tariffs. But at the time of signing, Tanzania as one of the members of EAC, refused to sign the EPA cooperation. Tanzania considers the EPA not to have a positive impact on its domestic condition. Tanzania wants to focus and build on the domestic economy, and if it signs the EPA it will make the aims and interests disturbed. This study aims to illustrate the domestic factors affecting Tanzania's foreign policy. This study is using the concept of determinants of foreign policy through domestic factor and external environment. The focus of this study is from 2014 to 2016.*

**Keywords:** *foreign policy decision, domestic factor, external environment, EPA EAC-EU*

## 1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2002, negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik (ACP) telah menegosiasikan *Economic Partnership Agreement* (EPA) dengan Uni Eropa (EU). EPA adalah skema untuk membuat area perdagangan bebas (FTA) antara Uni Eropa dan ACP. Negosiasi EPA ditargetkan menemukan kesepakatan pada tahun 2007, namun hingga saat ini proses negosiasi EPA masih belum menemukan titik temu.

EPA adalah kerjasama bilateral yang mengikat secara hukum antara Uni Eropa dan kelompok negara-negara ACP. EPA menjadi perubahan fundamental dalam hubungan perdagangan kedua belah pihak, dari sebelumnya yang *non-reciprocal* menjadi sesuai dengan aturan WTO, yaitu hubungan timbal-balik. Sebelumnya, dibawah akses *non-*

*reciprocal*, negara-negara ACP dapat secara bebas mengekspor hasil industrinya ke Uni Eropa sementara sebaliknya impor dari Uni Eropa dikenakan batasan dari ACP sesuai aturan yang berlaku di masing-masing negara anggota.

*East African Community (EAC)* merupakan salah satu dari tujuh pengelompokan regional yang menegosiasikan EPA dengan Uni Eropa sejak tahun 2004 (Selanjutnya disebut EPA EAC-EU). Negara-negara anggota EAC yang ikut dalam EPA adalah Tanzania, Rwanda, Uganda, Burundi dan Kenya. Tanzania, Rwanda, Uganda dan Burundi tergolong dalam negara-negara *Least Developed Countries (LDC)* sementara Kenya tergolong non-LDC. Bagi negara-negara LDC, mereka telah menikmati akses *Everything but arms*

(EBA) dimana mereka dapat mengekspor hasil industri (kecuali senjata dan amunisi) ke Uni Eropa tanpa adanya batasan/tarif. Skema EBA akan dicabut bagi semua negara-negara non-LDC jika tergolong menjadi negara berkembang sesuai ketentuan dan indikator dari PBB dan menandatangani dan meratifikasi segala jenis kerangka kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa. (European Parliament, 2002)

Kesepakatan penuh EPA EAC-EU baru dapat tercapai pada tahun Oktober 2014. EPA EAC-EU diharapkan dapat membangun perdagangan yang kuat dan pengembangan kemitraan yang akan memberikan kontribusi bagi perkembangan kedua pihak, mempromosikan integrasi regional serta integrasi EAC dalam ekonomi global, kerjasama ekonomi dan good governance, membantu membangun kebijakan perdagangan, membantu mengembangkan kapasitas produksi dan perdagangan EAC, membantu membangun peraturan yang transparan, dan penguatan hubungan antara Uni Eropa dan EAC (Kenya Human Rights Commission. 2014).

Rencana penandatanganan dan ratifikasi pada Oktober 2016 sesuai dengan penanggalan EPA pun dimajukan menjadi 18 Juli 2016 bertepatan dengan konferensi UNCTAD di Nairobi. Namun pada saat penandatanganan, Tanzania mendeklarasikan diri untuk menolak menandatangani EPA. Tanzania beralasan bahwa EPA tidak akan menguntungkan bagi EAC.

Penolakan Tanzania pada perjanjian yang telah disepakati pada 16 Oktober 2014 ini bukanlah kali pertama. Pada tahun 2014, Tanzania juga sempat menolak menandatangani draft kesepakatan penuh yang telah dirumuskan oleh perwakilan tiap negara EAC. Penolakan tersebut membuat kesepakatan EPA terhambat selama tiga minggu (Martin Mwita, 2016). Selain itu pada November 2016, Tanzania menggugat Kenya ke *East African Community Court of Justice* (EACJ). Hal ini dikarenakan Kenya secara sepihak telah menandatangani serta meratifikasi EPA pada September 2016. Menurut Tanzania, tindakan Kenya ini menyimpang dari spirit dan nilai-nilai semangat EAC. Tanzania berharap EPA harus dinegosiasikan secara kawasan, tidak sepihak (Omondi George, Daily Nation, 2016).

Dari hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas kasus ini. Penulis akan membahas sikap penolakan Tanzania terhadap EPA yang telah disepakati sebelumnya pada tahun 2014. Lebih khususnya terhadap faktor-faktor yang membuat Tanzania menolak EPA.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kajian Pustaka**

Literatur pertama paper berjudul "27 September 2012: 10 Years of EPA Negotiations: From Misconception and Mismanagement to Failure" oleh Marc Maes tahun 2012 di muat dalam *GREAT Insights*. Literatur ini menjelaskan tentang kegagalan EPA dalam mencapai kesepakatan, dalam kurun waktu tahun

2002 hingga 2012. Setelah 10 tahun negosiasi, baru satu kawasan yang menyelesaikan kesepakatan EPA.

Marc Maes menjelaskan alasan utama mengapa EPA gagal mencapai kesepakatan setelah 10 tahun bernegosiasi. Ada jarak antara pendekatan Uni Eropa terhadap EPA dan ekspektasi dari negara-negara ACP. Marc berargumen bahwa pendekatan Uni Eropa tidak tepat. Pada tahun 2002, komisi Uni Eropa merancang EPA, negosiasi perdagangan bebas untuk mencapai integrasi secara komprehensif. Perdagangan bebas tersebut tidak hanya meliberalisasi investasi, perdagangan barang dan jasa, namun juga mengenalkan kompetisi, pengadaan pemerintah, fasilitasi perdagangan, hak property intelektual dan proteksi data.

Rancangan Uni Eropa tersebut dinilai sangat menyeluruh dan sesuai dengan aturan WTO. Bagi Uni Eropa, konsep tersebut tidak akan membutuhkan banyak perubahan kebijakan karena merefleksikan praktik-praktik yang telah dilakukan Uni Eropa. Namun bagi negara-negara ACP, mereka berharap akan EPA yang dapat menyelesaikan masalah WTO *compatibility*, meningkatkan kapasitas produksi, infrastruktur, institusi dan usaha integrasi kawasan. Tetapi EPA tersebut ternyata membutuhkan reformasi besar-besaran meliputi administratif, legal, dan konstitusional. Konsep EPA dinilai merupakan program reformasi ekonomi besar-besaran.

Bagi ACP, kurun waktu tersebut terlalu singkat untuk memulai reformasi

menyeluruh. Ditambah dengan pemaksaan *deadline*, Marc melihat bahwa ACP akan memilih EPA bukan karena efektifitasnya untuk perkembangan mereka, namun karena takut kehilangan akses preferensi. Lima tahun setelah tulisan Marc atau 16 tahun dalam bernegosiasi, baru SADC yang secara regional telah menyelesaikan dan memasuki tahap *provisional application* EPA.

Tulisan Marc membantu penulis dalam memetakan masalah mengapa EPA dikatakan gagal hingga saat ini. Marc menilai dari sisi perjanjian EPA yang terlalu kompleks bagi kondisi domestik seperti administratif, legal, institusi dan integrasi. Kondisi domestik negara ACP dinilai belum siap untuk perubahan komprehensif yang ditawarkan EPA. Namun Marc hanya menjelaskan secara umum, tidak secara rinci mengapa dikatakan belum siap secara domestik ataupun menggunakan salah satu negara. Untuk itu, disini penulis akan melihat kondisi domestik yang lebih rinci yaitu mengenai kondisi ekonomi dan kepentingan ekonomi negara-negara ACP, khususnya Tanzania dalam menghadapi EPA.

Selanjutnya adalah jurnal oleh Terhempa N. Ambe-Uva and Kasali M. Adegboyega tahun 2007 berjudul "*The Impact of Domestic Factors on Foreign Policy: Nigerian/Israeli Relations*". Terhempa dan Kasali menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Nigeria terhadap hubungannya dengan Israel dalam konteks restorasi hubungan diplomatik. Mereka berasumsi bahwa faktor domestik menjadi instrumen

kebijakan luar negeri Nigeria terhadap Israel.

Tulisan Terhempa dan Kasali membantu penulis bahwa faktor domestik memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Namun perbedaannya adalah cakupan penelitian. Cakupan Terhempa dan Kasali adalah kebijakan luar negeri Nigeria terhadap hubungan diplomatik dengan Israel dalam berbagai hal seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Sementara penelitian ini hanya mendeskripsikan kebijakan luar negeri Tanzania terkait kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa melalui EPA.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 1. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (A.A Banyu Perwita, 2006). Kebijakan luar negeri merupakan instrument bagi negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya di dalam percaturan dunia internasional.

Dalam proses pembuatan kebijakan negeri, Mintz menjelaskan terdapat empat faktor penentu pembuatan kebijakan luar negeri. Decision environment berbicara mengenai karakteristik sebuah keputusan meliputi batas waktu pengambilan keputusan, ambiguitas dan pengetahuan akan informasi mengenai sebuah keputusan, akibat serta setting dari keputusan

tersebut. Faktor berikutnya adalah faktor psikologis, bagaimana latar belakang, nilai, emosi, cara berpikir dari seorang kepala negara mempengaruhi pengambilan keputusan.

Sementara dua faktor lainnya yaitu, faktor eksternal dan faktor domestik berbicara mengenai kondisi yang mempengaruhi pengambilan kebijakan. Faktor eksternal mencakup kondisi dari arena internasional yaitu *deterrence*, perlombaan senjata, strategi, aliansi, dan rezim. Sementara faktor domestik dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri yaitu *diversionary tactics*, kepentingan ekonomi, opini publik, siklus pemilu, dan *two level games*.

#### 1a. Faktor Eksternal

Ajit Kumar (2017) menyederhanakan faktor-faktor eksternal yang dijelaskan Mintz sebagai *external environment*. Hal tersebut karena faktor eksternal oleh Mintz lebih relevan terhadap isu-isu perang yang terjadi pada saat itu. *External environment* yang dimaksud disini adalah Kebijakan Luar Negeri harus beroperasi di lingkungan internasional yang tunduk pada banyak perubahan situasional dan sering terjadi. Akibatnya, ia selalu beradaptasi sesuai dengan perubahan ini. Perubahan situasional ini bertindak sebagai masukan kebijakan luar negeri. *External environment* ini dipengaruhi oleh *strategic surprise*, *alliances*, dan jenis rezim berkuasa.

*External environment* tiap negara berbeda-beda sesuai dengan posisinya dalam arena internasional. Bagaimana

negara mengafiliasikan diri terhadap kelompok-kelompok serta perjanjian-perjanjian internasional ini akan berdampak terhadap *external environment*. Contohnya negara-negara anggota NATO akan memiliki peraturan-peraturan internasional yang harus diikuti sesuai dengan perjanjian antar anggota NATO. Ataupun negara-negara Uni Eropa memiliki integrasi antar sesama anggota yang sangat kuat memiliki pengaruhnya terhadap afiliasinya dengan negara-negara lain.

### **1b. Faktor Domestik**

Pada penelitian ini akan berfokus pada faktor domestik yang mempengaruhi keputusan Tanzania menolak kerjasama EPA dengan Uni Eropa. Namun, penulis juga akan mendeskripsikan kondisi arena internasional dalam lingkungan Tanzania untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri. Hal ini untuk melihat bagaimana faktor domestik memiliki peranan lebih dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Kogan dalam Mubeen Adnan (2014) menambahkan bahwa pengaruh domestik terhadap kebijakan luar negeri sangat dominan sehingga sulit untuk dibedakan antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri. Terhemba dan Kasali (2007) berargumen bahwa faktor domestik memiliki dampak yang besar terhadap pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Selain itu, peran negara dalam arena internasional juga dipengaruhi oleh faktor domestik negara (Northedge, 1968). Nwosu (1993) menjelaskan pengaruh dari faktor domestik dalam membentuk

kebijakan luar negeri dapat dilihat dari seberapa kompleks kebijakan tersebut.

Dari uraian diatas, penulis menggunakan faktor kondisi dan kepentingan ekonomi, opini publik, dan siklus pemilu dalam melihat penolakan Tanzania terhadap EPA. Penulis tidak menggunakan faktor two-level game karena tidak menganalisa proses pengambilan kebijakan yang terjadi di arena domestik dan internasional dalam waktu bersamaan. Faktor two level-game melihat bagaimana kondisi internasional dan domestik saling mempengaruhi terhadap sebuah kebijakan dan juga bagaimana para pembuat kebijakan terpengaruh terhadap hal tersebut.

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen (1982) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul lebih berupa kata-kata atau gambar. Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010). Maka dari itu, penelitian ini akan menggambarkan faktor-faktor penyebab penolakan Tanzania terhadap kerjasama EPA.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Penelitian**

#### **4.1.1 Gambaran Umum Profil Tanzania**

Tanzania merupakan sebuah negara terletak di timur Afrika di dalam wilayah danau besar Afrika. Sebagian wilayah Tanzania berada dalam kawasan Selatan Afrika. Tanzania berbatasan dengan Kenya dan Uganda di utara. Rwanda, Burundi, dan Kongo di barat. Zambia, Malawi, dan Mozambik di selatan, dan laut India di timur.

Tanzania melaksanakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pada 26 Oktober 2015, Tanzania menggelar pemilihan umum yang kemudian dimenangkan oleh presiden John Magufuli yang merupakan kader dari partai CCM. CCM juga mendapatkan 75 persen kursi di parlemen. Kemenangan ini menjadikan CCM partai yang dominan dan paling lama dalam menjalankan sistem pemerintahan Tanzania.

Media massa di Tanzania mulai berkembang pesat sejak sistem multi partai mulai diberlakukan pada tahun 1992. Media massa terbesar di Tanzania adalah Daily News yang dimiliki oleh pemerintah dan merupakan koran tertua. Kemudian diikuti oleh *The Guardian* dan *The Citizen* yang dimiliki oleh pihak swasta.

Secara ekonomi Tanzania mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal tersebut karena Tanzania mampu melakukan perubahan-perubahan penting dan mempertahankan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut ditandai dengan meningkatnya *Gross Domestic Product* (GDP) Tanzania dari

tahun 2009-2015 sebesar 6-7 persen per tahun.

Perekonomian Tanzania tergantung pada sektor agrikultur dan mineral (batu berharga, emas, berlian). Kontribusi sektor agrikultur dan mineral pada tahun 2015 tercatat sebesar 29 persen dari GDP tahunan. Kontribusi ini merupakan yang terbesar melewati berbagai sektor lainnya. Selain itu, sektor ini juga menyediakan lapangan kerja terbesar di Tanzania sebesar 65.5 persen. Pada musim baik, sektor ini memenuhi 100 persen kebutuhan pangan domestik. Sektor agrikultur dan mineral juga mencatatkan 85 persen ekspor Tanzania ke negara-negara mitra dagang. (Tanzania Economic Outlook, 2016)

#### **4.1.2 Gambaran Umum Tanzania sebagai Negara Least Developed Country (LDC)**

Walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, Tanzania masih merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Menurut *Human Development Index* (HDI), Tanzania berada pada urutan 151 dari 188 negara. Sekitar 36 persen masyarakat Tanzania hidup di bawah garis kemiskinan. Tiga dari 10 masyarakat Tanzania hidup dengan kemiskinan, dan satu dari tiga masyarakat mengalami buta huruf. Sementara itu, sekitar 80 persen masyarakat mengandalkan kehidupan pada sektor agrikultur yang membuat mereka rentan terhadap guncangan iklim, ekonomi dan musiman. Kemiskinan tersebut berdampak pada kelaparan. Sekitar 42 persen anak-anak dibawah lima tahun mengalami

malnutrisi kronis dan 16 persen mengalami kekurusan.

Tanzania pun termasuk dalam kategori *Least Developed Country* (LDC) menurut PBB melalui *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC). Sebagai negara LDC, Tanzania mendapatkan perlakuan khusus dan bantuan internasional melalui *International Support Measures* (ISM) dari berbagai negara-negara maju. Bantuan-bantuan ISM meliputi bantuan pembangunan, perdagangan internasional, dan dukungan umum lainnya.

Salah satu bantuan perdagangan internasional datang dari Uni Eropa melalui inisiatif *Everything But Arms* (EBA). EBA merupakan salah satu dari tiga pengaturan *Generalized Scheme of Preferences* (GSP) Uni Eropa. Dengan EBA, negara-negara LDC mendapatkan akses bebas pajak, dan bebas kuota ke pasar Uni Eropa untuk semua produk – kecuali senjata dan amunisi dengan periode waktu tak terbatas.

#### **4.1.3 Hubungan Dagang dengan Uni Eropa**

Perdagangan antara Tanzania dan Uni Eropa berada di bawah inisiatif EBA. Secara menyeluruh, Uni Eropa berada pada peringkat lima dalam hubungan dagang dengan Tanzania. Impor dari Uni Eropa pada tahun 2016 ke Tanzania berada pada urutan ke empat dengan total nilai 893 juta dollar AS.

Impor sektor industri Tanzania dari Uni Eropa kebanyakan terdiri dari mesin-mesin pembangkit listrik dan mesin-mesin produksi sebanyak 27% dari total impor.

Sektor ini membantu Tanzania dalam memproduksi dan meningkatkan perekonomiannya. Selain itu, Tanzania memberlakukan tariff sebesar 10 hingga 25% untuk barang-barang industri tersebut. (Bank of Tanzania, 2016)

Sementara untuk ekspor, sektor agrikultur dan mineral mendominasi ekspor ke Uni Eropa. Ekspor Tanzania ke Uni Eropa di pimpin oleh sektor agrikultur mencapai 68 persen dari total ekspor dengan nilai mencapai 433 juta dollar AS. Sementara sektor mineral terutama batu-batu berharga tercatat nilai 65 juta dollar AS, atau sebesar 11 persen dari total ekspor. Ekspor Tanzania ke Uni Eropa tidak dikenakan pajak atau kuota dibawah inisiatif EBA. (European Union, Trade in goods with Tanzania, 2016)

#### **4.1.4 Kerjasama Economic Partnership Agreement (EPA)**

Pada Oktober 2014, negosiasi EPA EAC-EU berhasil menemukan kesepakatan penuh. Kesepakatan tersebut mencakup akses pasar bagi ekspor EAC ke Uni Eropa bebas kuota dan bebas pajak (kecuali senjata dan amunisi). Akses pasar akan mulai diberlakukan ketika EPA di tandatangani dan di ratifikasi oleh kedua pihak pada Juli 2016. Sementara untuk implementasinya akan efektif mulai diberlakukan setelah penandatanganan dan ratifikasi dilakukan oleh kedua pihak. (Melo dan Regolo, 2014)

Bagi EAC, mereka harus membuka pasar bagi impor dari Uni Eropa secara parsial dan bertahap yang berakhir pada tahun 2033 dengan total nilai 82.6 persen.

Di bawah EAC CU, 65 persen dari total impor sudah bebas pajak. Sisa 15 persen akan secara progresif di buka dalam kurun waktu 15 tahun sejak kesepakatan penuh tersebut di implementasi. Sementara 2.6 persennya akan mulai dibuka pada tahun 2029. Secara keseluruhan, EAC harus menambah akses pasar bebas hambatan bagi Uni Eropa sebesar 17.6 persen dalam kurun waktu 25 tahun. Hal ini diberlakukan agar pelaku produksi dari negara-negara EAC dapat menyesuaikan.

EPA juga berisikan tentang *Raw Materials Initiative* (RMI) terutama berkaitan dengan proyek pembangunan berkelanjutan. Dengan RMI, akses untuk mendapatkan bahan-bahan baku primer dan sekunder harus diprioritaskan dalam kebijakan dan perdagangan dengan Uni Eropa.

Dalam kesepakatan tersebut, EAC dan Uni Eropa sepakat untuk mengecualikan beberapa produk dari liberalisasi. Produk-produk tersebut dianggap sensitif bagi pasar EAC dan masuk dalam daftar *sensitive list*. Produk-produk tersebut akan dikenakan tariff mulai dari 35 persen hingga 60 persen berdasarkan peraturan EAC CU. Hal ini dilakukan untuk melindungi dari kompetisi dengan produk-produk dari Uni Eropa.

#### **4.2 Kebijakan Luar Negeri Tanzania Terhadap Economic Partnership Agreement (EPA)**

Pada tahun 2014, Tanzania dan negara-negara mitra EAC telah menyetujui kesepakatan penuh EPA. Kesepakatan ini dirasa seimbang dan sepenuhnya sejalan

dengan ambisi EAC. Kesepakatan tersebut kemudian dijadwalkan akan dilakukan penandatanganan pada 18 Juli 2016 (EPA EAC – EU Fact Sheet, 2016). Namun bertepatan saat penandatanganan, Tanzania menolak menandatangani kesepakatan tersebut.

Sekretaris permanen urusan luar negeri Tanzania, Aziz Mlima mengatakan bahwa EPA tidak akan menguntungkan bagi industri lokal di Afrika Timur (EAC). Namun malah akan membawa kehancuran bagi industri lokal karena kalah bersaing dengan produk-produk dari negara-negara berkembang.

Penolakan juga datang dari parlemen Tanzania mengatakan bahwa EPA yang telah dinegosiasikan tersebut buruk bagi perekonomian negara. Kesepakatan tersebut tidak sesuai dan sejalan dengan visi pertumbuhan nasional Tanzania dan harus dinegosiasikan ulang dengan membawa kepentingan nasional Tanzania. Parlemen juga mengingatkan pemerintah bahwa EPA harus dijadikan tantangan untuk membangun ekonomi tangguh dan menjadikan Tanzania negara Industri.

Tanzania melihat bahwa menandatangani EPA hanya akan menghambat tujuan industrialisasi dan memberikan kerugian bagi perekonomian Tanzania. Tujuan dan usaha integrasi kawasan tidak menjadi kepentingan utama dalam negosiasi EPA (Gideon, 2017). Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Tanzania tersebut akan dilihat dari kondisi domestik Tanzania tahun 2014 – 2016 mengingat

Tanzania sempat setuju terhadap kesepakatan EPA. Tetapi sebelumnya penulis akan melihat bagaimana pengaruh external environment terhadap kebijakan Tanzania dan relevansinya dengan faktor domestik.

#### **4.2.1 Kondisi External Environment Tanzania**

Sebagai negara LDC, Tanzania mendapatkan bantuan *Everything but arms* (EBA) dari Uni Eropa. EBA menjamin Tanzania dan negara-negara LDC lainnya untuk dapat mengakses pasar Uni Eropa tanpa dibebankan bea pajak. EBA sendiri akan hilang jika status sebuah negara berhasil digolongkan menjadi negara *developed*. Selain itu, jika sebuah negara menandatangani dan meratifikasi sebuah kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa, maka akses EBA akan digantikan dengan kerjasama tersebut. Tanzania harus memastikan bahwa kondisi domestik negaranya siap untuk menerima konskuensi dari menandatangani EPA dan kehilangan akses EBA.

Marc Maes (2012) menjelaskan bahwa perjanjian EPA itu sangat kompleks sehingga membutuhkan reformasi penuh terhadap kondisi domestik negara-negara ACP termasuk Tanzania. Setidaknya jika Tanzania sudah siap kehilangan akses EBA, itu karena Tanzania berhasil tergolong ke dalam negara *developed* dengan kata lain kondisi domestik Tanzania sudah mumpuni untuk mengimplementasikan EPA. Sebaliknya, Tanzania tidak akan memilih kehilangan akses EBA dengan cara menandatangani

EPA jika kondisi domestiknya belum siap. Hal ini membuat bahwa kondisi domestik Tanzania lebih harus diperhatikan.

Selanjutnya, pada tahun 2014 saat kesepakatan penuh EPA dicapai antara EAC dan Uni Eropa, Inggris masih menjadi salah satu anggota Uni Eropa. Namun pada 26 Juni 2016, Inggris melalui referendum memilih keluar dari keanggotaan Uni Eropa (selanjutnya disebut *Brexit*).

Setelah berita Brexit, Tanzania memilih untuk menolak menandatangani EPA. Dr Aziz Mlima mengatakan negaranya tidak akan menandatangani EAC-EU EPA dengan alasan 'kekacauan di Uni Eropa yang disebabkan oleh Brexit'. Melihat statistik, Inggris mungkin merupakan partner terbesar perdagangan antara EAC dan Uni Eropa, tetapi mayoritas berasal dari Kenya. Sementara mitra dagang terbesar Tanzania dalam Uni Eropa adalah Jerman. Bahkan pada tahun 2014 hanya 2 persen dari ekspor dunia Tanzania yang mengalir ke Inggris, jauh lebih sedikit daripada persentase ekspor dunia mereka ke negara-negara seperti India, China dan Uni Emirat Arab (Willemien Viljoen, 2016).

*Brexit* hanyalah kambing hitam untuk menghentikan perundingan, dimana rezim pemerintahan Tanzania sebelumnya telah mencoba untuk keluar dari EPA (Sekou Toure Otondi, 2016). Tanzania hanya menggunakan *Brexit* sebagai alasan dari penolakan mereka terhadap EPA. Tidak ada hubungan langsung *Brexit* terhadap kerjasama EAC-EPA, melainkan kondisi domestik Tanzania belum siap untuk menerima EPA. Tanzania secara historis lebih condong pada kebutuhan

untuk melindungi ekonominya, sebuah tren yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden John Magufuli.

Dari kondisi *external environment* diatas dapat dilihat bahwa memang ada peraturan dan perubahan-perubahan yang terjadi terjadap kondisi arena internasional pada perjanjian EPA antara EAC dan Uni Eropa. Namun, Tanzania menolak EPA karena ada faktor-faktor domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri tersebut.

#### **4.2.2 Kondisi dan Kepentingan Ekonomi Tanzania**

Pada tahun 2015, CDP mengeluarkan laporan tiga tahunan untuk daftar negara-negara yang tergolong LDC. Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa Tanzania masih tergolong ke dalam negara LDC dan gagal masuk dalam proyeksi kelulusan tahun 2025. Tanzania hanya mampu melewati satu dari tiga indikator kelulusan yang ditetapkan CDP.

Walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi cukup signifikan, namun tingkat kemiskinan dan kondisi masyarakat yang masih berada di bawah standar membuat Tanzania masih tergolong negara LDC. Sebagai negara LDC, Tanzania lebih memilih menolak EPA karena masih mendapatkan akses ke pasar Uni Eropa tanpa pajak dan kuota dibawah EBA. Adapun Jika Tanzania menandatangani EPA dengan status sebagai negara LDC maka akses EBA tersebut akan dicabut dan Tanzania harus membuka pasar dan menghapus penerapan tarif bagi produk-produk dari Uni Eropa.

Selain itu, pada tahun 2016 pemerintah Tanzania mulai melakukan perubahan – perubahan ekonomi domestik yang mulai fokus dalam pembangunan industri dalam negeri. Hal tersebut tertuang dalam Visi 2025 dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan (2016/17 – 2020/21). Fokus pemerintah sekarang adalah untuk membangun fondasi yang kuat dalam industrialisasi. Tanzania tidak ingin menjadi sumber bahan baku bagi barang-barang Uni Eropa. Tetapi melalui rencana pemerintah tersebut, Tanzania ingin memanfaatkan bahan baku yang dimiliki untuk kemudian diolah dan diproses secara domestik yang akan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat Tanzania ketimbang mengekspornya ke Uni Eropa.

Sementara jika menandatangani EPA, maka Tanzania akan menjadi negara pemasok bahan baku bagi Uni Eropa dan bertentangan dengan visi industrialisasi yang direncanakan. Hal tersebut karena EPA memiliki aturan RMI yang mewajibkan ekspor bahan bahan mentah serta diberlakukannya subsidi bagi ekspor tersebut. Tanzania ingin mengubah kebiasaan yang selama ini bergantung pada sektor agrikultur dan mineral untuk ekspor ke luar negeri, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

#### **4.2.3 Opini Publik Terhadap EPA**

EPA telah lama mendapat penolakan dari publik, terutama para pakar dan akademisi yang kemudian memberikan sumbangsih analisa mereka dan membentuk pandangan masyarakat

mengenai dampak EPA bagi Tanzania. Mereka menganggap bahwa EPA tidak memberikan dampak positif melainkan dapat membahayakan perekonomian Tanzania.

Claude (19665) mejelaskan bahwa media massa dapat digunakan oleh para elit politik dan para ahli dalam membentuk opini publik. Para ahli dan elit politik di Tanzania pun juga menggunakan media massa sebagai instrument untuk menyebarkan opini mereka. Para akademisi Universitas Dar es Salaam – Prof Palamagamba Kabudi, Dr John Jingu dan Dr Ng'wanza Kamata melalui media *The Citizen* (2016) menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu buru-buru untuk menandatangani EPA karena akan berdampak bagi perekonomian nasional. Pemerintah harus melihat kondisi domestik bahwa produk-produk Tanzania saat ini tidak akan mampu bersaing dengan produk Uni Eropa dan kerjasama EPA hanya akan menguntungkan Uni Eropa saja.

Claude (1965) berargumen bahwa opini publik selalu menjadi faktor politik yang membimbing kebijakan luar negeri. Adnan (2014) menjelaskan bahwa opini dari para akademisi berbeda dengan masyarakat umum. Opini masyarakat umum dapat dibentuk karena pandangan para akademisi dan elit politik, namun tidak sebaliknya. Opini para akademisi dan elit politik dianggap sebagai nasehat bagi para pembuat kebijakan. Pada 7 November 2016, para akademisi Prof Palamagamba Kabudi, Dr John Jingu dan Dr Ng'wanza Kamata dipanggil kehadiran parlemen

Tanzania untuk memberikan analisa dan opini mereka terhadap EPA.

Sebagai hasilnya pada taggal 8 November 2016, parlemen Tanzania dengan suara bulat menyarankan pemerintah untuk tidak menandatangani EPA. Walaupun tidak ada mobilisasi massa, namun opini yang diberikan tersebut dirasa sangat bermanfaat, terarah dan terukur bagi anggota parlemen Tanzania dalam merumuskan kebijakannya. Opini-opini tersebut mampu mempengaruhi keputusan parlemen Tanzania. Keputusan parlemen tersebut datang dari partai penguasa dan partai oposisi. Parlemen mengatakan bahwa EPA akan mengganggu kerjasama antara Tanzania dan EU dalam hal bantuan luar negeri juga EPA dalam bentuk yang sekarang ini tidak memberikan dampak positif (The Citizen, 2016).

#### **4.2.4 Pemilihan Umum Tanzania**

Pada tahun 2015 Tanzania melaksanakan pemilihan umum untuk kelima kalinya sejak diberlakukannya sistem multi partai pada tahun 2015. Pemilihan tersebut menentukan presiden, anggota parlemen, dan anggota dewan daerah. John Magufuli, kader dari partai CCM memenangkan pemilihan tersebut.

Dibawah pemerintah presiden Magufuli, pemerintah mengeluarkan rencana Visi 2025 dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan (2016/17 – 2020/21). Dengan rencana tersebut Tanzania melakukan perubahan – perubahan ekonomi domestik yang mulai fokus dalam pembangunan industri dan

pemberantasan kemiskinan serta mengurangi impor barang konsumsi dan ekspor bahan baku.

Pemilihan umum memiliki pengaruh dalam keputusan Tanzania menolak EPA. Quandt (1986) menambahkan bahwa terpilihnya presiden baru dapat berarti berubahnya arah pemerintahan yang dapat berdampak pada arah kebijakan luar negeri. Hal ini terjadi dalam kasus Tanzania, dimana Presiden Magufuli menggantikan Jakaya Kikwete yang dibawah pemerintahannya Tanzania setuju dalam EPA.

Kepentingan Tanzania dibawah pemerintahan Presiden Magufuli adalah untuk meningkatkan meningkatkan pererkonomian domestik melalui industriliasasi dalam negeri memanfaatkan produksi barang-barang mentah. Maka dari itu Presiden Magufuli meolak EPA karena dianggap merupakan bentuk kolonialisme baru dari Uni Eropa untuk menguasai barang-barang mentah Tanzania.

Jika Tanzania menyetujui EPA, maka Tanzania hanya akan menjadi pemasok barang-barang mentah ke Uni Eropa yang kemudian hasil jadinya akan diimpor kembali oleh Tanzania.

Mintz (2010) juga menambahkan bahwa jadwal pemilihan umum dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Pemilihan umum Tanzania dilakukan pada tahun 2015, setahun setelah kesepakatan penuh tercapai dan setahun sebelum prosesi penandatanganan EPA. Jika pemilihan umum tersebut dilaksanakan setelah prosesi penandatanganan EPA maka Tanzania bisa menyetujui EPA.

## 5. KESIMPULAN

Pada tahun 2016, Tanzania mengambil keputusan menolak menandatangani kerjasama EPA dengan Uni Eropa. Penolakan Tanzania ini dilakukan sesaat sebelum prosesi penandatanganan harusnya dilakukan. Tindakan tersebut membuat kerjasama yang telah dinegosiasikan selama 10 tahun ini menjadi tidak jelas kelanjutannya dan menimbulkan gejolak dalam kelompok kawasan EAC.

Penolakan tersebut dilakukan karena untuk melindungi industri lokal dan menjaga kondisi domestik. Tanzania melihat EPA hanya akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian nasional. Adapun berbagai hal yang mempengaruhinya dapat dilihat dari kondisi domestik Tanzania. Faktor-faktor domestik yang mempengaruhi keputusan tersebut meliputi kondisi dan kepentingan ekonomi, opini publik, serta pemilihan umum.

Ada beberapa peraturan perubahan dalam kondisi arena internasional lingkungan Tanzania. Skema EBA yang memberikan Tanzania akses pasar ke Uni Eropa tanpa bea akan dicabut jika Tanzania menandatangani EPA dan atau kondisi domestik Tanzania menjadi negara berkembang serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Kedua hal tersebut memiliki implikasi sendiri terhadap pengambilan kebijakan luar negeri Tanzania, tetapi keputusan menolak EPA datang dari faktor-faktor domestik. Tanzania menolak EPA karena kondisi domestiknya belum siap sehingga lebih memilih EBA. Dan implikasi

Brexit yang lebih kepada pemberian bantuan luar negeri, bukan skema perdagangan bebas.

Keputusan Tanzania ini menunjukkan bahwa faktor domestik memiliki peranan penting dalam perumusan kebijakan luar negeri. Walaupun hanya negara kecil dibanding Uni Eropa, tetapi Tanzania mampu menolak kerjasama EPA demi memenuhi kepentingannya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Bilal, S., & Brau-Munzinger, C. (2008). *EPA Negotiations and regional integration in Africa: Building or stumbling blocs*. ECDPM.
- Foxley, A. (2010). *Regional Trade Blocs The Way To The Future?*. Washington D.C: Carnegie Endowment for International Peace.
- Friedman, Jeffrey (1996). *The Rational Choice Controversy*. Yale University Press
- Pollack, M.A. (2006). *Rational Choice and EU Politics. Handbook of European Union Politics*. Sage Publications.
- Glaser, C.L. (2010). *The Rational Theory of Interational Politics: The Logic of Competition and Cooperation*. New Jersey: Priceton University Press.
- Ghony, Djunaidi & Fauzan Al-Mansur. (2012). *Metode Penelitian kualitatif*. Malang: Ar-Ruzmedia.
- Hudson, V. (eds). (2002). *Foreign Policy Making (Revisited)*. New York: Palgrave Macmillan.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Levin, J., & Milgrom, P. (2004). *Introduction to Choice Theory*. Oxford University Press.
- Mas'oed, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Pustaka LP3ES Indonesia
- Mbitih, M.L., Gor, S.O., & Osoro, K.O. (2015). *Impact of economic partnership agreements: the case of EAC's manufactured imports from EU. International Journal of Business and Economic Development* Vol.3 No.2. Kenya: School of Economic, University of Nairobi.
- Meyn, Mareike. (2008). *Economic Partnership Agreements: A 'historic step' towards a 'partnership of equals'?*. London: Overseas Development Institute.
- Mintz, A. (2004). *How Do Leaders Makes Decision? A Poliheuristic*

- Perspective. Journal of Conflict Resolution*, Vol.48 No.1, February. Sage Publications.
- Mintz, A., & DeRouen K. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge University Press.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Borrmann, A., Busse, M., (2006). 'The institutional challenge of the ACP/EU Economic Partnership Agreements'. HWWI Research Paper. Retrieved from [http://www.hwwi.org/uploads/tx\\_wilpubdb/HWWI\\_Research\\_Paper\\_2-3.pdf](http://www.hwwi.org/uploads/tx_wilpubdb/HWWI_Research_Paper_2-3.pdf)
- Cuts Geneva. (2009). *Revenue Implications of the EC-EAC EPA: The Case of Tanzania*. Retrieved from [www.cuts-geneva.org/.../BIEAC-BP09-Revenue\\_Implications\\_of\\_the\\_EC-EAC\\_EPA....](http://www.cuts-geneva.org/.../BIEAC-BP09-Revenue_Implications_of_the_EC-EAC_EPA....)
- East African Community. (2012). *Briefing on EAC-EC EPA Negotiations*. Retrieved from [http://www.eac.int/trade/index.php?option=com\\_content&view=article&id=121](http://www.eac.int/trade/index.php?option=com_content&view=article&id=121)
- EC DG Trade. (2015). *Economic Partnership Agreement between the EU and the Eastern African Community* (EAC). Retrieved from [trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc\\_142194.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142194.pdf)
- EC DG Trade. (2006b). 'Economic Partnership Agreements: Overview'. Retrieved from [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/october/tradoc\\_130671.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/october/tradoc_130671.pdf)
- International Food & Agricultural Trade Policy Council. (2011). *Economic Partnership Agreements and African Regional Integration: Have negotiations helped or hindered regional integration?*. Retrieved from <http://www.gmfus.org/publications/economic-partnership-agreements-and-african-regional-integration-have-negotiations>
- Karuhanga, J. (2016). *East Africa: EAC-EU Trade Deal Signing Called Off*. Retrieved from <http://www.newtimes.co.rw/section/article/2016-07-18/201812/>
- Kenyan Human Rights Division. (2014). *The ABC of EAC-EU Economic Partnership Agreements (EPA)*. Retrieved from <http://www.khrc.or.ke/mobile-publications/economic-rights-and-social-protection-er-sp/59-the-abc-of-eac-eu-economic-partnership-agreements-epa.html>

Lyimo, Henry. (2016). *East Africa: Why Cautionary Approach to EPA's Deal is Important*. Retrieved from [allafrica.com/stories/201607190470.html](http://allafrica.com/stories/201607190470.html)

Mabele, R.B. (2007). *The Challenges of the Economic Partnership Agreements in Tanzania*. Retrieved from [library.fes.de/pdf-files/bueros/tanzania/04756.pdf](http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tanzania/04756.pdf)